



Jangan Coblos Caleg Bandel

Sanksi Sosial dari Masih Maraknya APK

JOGJA - Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 telah memasuki tahap masa tenang. Meski demikian, ternyata bukan berarti masa tenang yang berlangsung hingga Selasa besok (8/4) tercipta suasana yang benar-benar tenang. Setidaknya, alat peraga kampanye (APK) masih terpasang di banyak tempat. APK belum bersih dari pinggir-pinggir jalan ■



Tidak perlu tindakan keras. Mari jaga Jogja yang nyaman dan aman. Mari kita hormati aturan dan kesadaran dari parpol sangat dibutuhkan.

► *Baca Jangan Coblos... Hal 11* HARYADI SUYUTI, Wali Kota Jogja

■ JANGAN COBLOS...

Sambungan dari hal 1

Ini terlihat di Jalan Kusumanegara, Jalan Ipda Tut Harsono, dan beberapa penggal jalan lain di Kota Jogja kemarin (6/4). Di sejumlah jalan tersebut terlihat masih banyak terpasang APK.

Penurunan APK merupakan kewajiban dari partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg). Tapi, jika parpol dan caleg tak melaksanakan kewajiban tersebut maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak bisa memberikan sanksi.

"Hanya sanksi sosial yang bisa diberikan," tutur komisioner KPU DIJ Bidang Humas dan Pemilih Faried Bambang Siswanto kemarin.

Faried menjelaskan, sanksi sosial dengan tidak mencoblos

caleg yang membandel pada tanggal 9 April mendatang malah lebih efektif. "Secara citra, partai atau caleg tersebut membandel, tidak taat aturan. Ini yang perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat," katanya.

Bagi caleg atau parpol yang tak segera menurunkan APK, dia mengungkapkan, KPU bakal menerbitkan surat imbauan. Ini akan diterbitkan sampai dengan H-1 pencoblosan atau Selasa (8/4).

"Dari berapa surat imbauan yang mereka terima sudah bisa dilihat citranya," terang Faried.

Komisioner yang belatar belak aktivis ini menambahkan, penurunan paksa APK sebenarnya menjadi ranah dari satuan polisi pamong praja (satpol PP). Tapi, lanjutnya, pelaksanaannya kerap menghadapi kendala. Terutama menyangkut jumlah personel yang menertibkan.

"Juga, alat yang digunakan untuk menurunkan," lanjut Faried.

Seperti pengalaman yang ada, jajaran satpol PP kesulitan ketika harus menurunkan APK sejenis baliho. Penurunan APK tersebut membutuhkan alat berat seperti *crane*. Alat ini tak selalu dimiliki oleh satpol PP.

"Jika harus penurunan paksa dengan biaya tinggi, satpol PP pasti terbebani. Mereka terbatas dengan anggaran," imbuhnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja Agus Triyatno menegaskan, lembaga yang memberikan kesempatan pada hari pertama masa tenang kepada parpol untuk menurunkan sendiri APK. Jika tetap masih ada APK milik caleg dan parpol yang terpasang, Panwaslu siap merekomendasikan kepada satpol PP untuk menurunkannya.

"Sebenarnya lebih baik jika mereka sendiri yang menurunkan. Karena, APK tersebut bisa dimanfaatkan. Ada rasa memiliki daripada orang lain," jelas mantan wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jogjakarta ini.

Agus menerangkan, penurunan paksa APK tetap akan dilakukan. Langkah itu siap ditempuh usai koordinasikan dengan satpol PP sebagai pelaksana penurunan dan kepolisian yang bertugas mengamankan proses penertiban APK.

Di sisi lain, dari pantauan *Radar Jogja* Minggu (6/4), masih banyak atribut parpol terpasang di terpasang. Bahkan, imbauan yang dilontarkan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) seolah tidak terlalu didengar oleh parpol.

Tapi, masih ada waktu bagi parpol dan caleg untuk menu-

Masa Tenang

Tak Disadari Parpol

runkan APK secara mandiri. HS sempat meminta saat H-1 pencoblosan tidak ada lagi APK atau atribut parpol yang terpasang.

Suami dari Tri Kirana Muslidatun tersebut mengatakan, Pemkot Jogja sejatinya enggan menurunkan paksa APK.

Pemkot, jelasnya, tidak ingin terjadi gesekan. Sebab, lanjutnya,

gesekan yang muncul dapat merusak kenyamanan dan keamanan Kota Jogja.

"Tidak perlu tindakan keras. Mari jaga Jogja yang nyaman dan aman. Mari kita hormati aturan dan kesadaran dari parpol sangat dibutuhkan," kata Haryadi kemarin.

Terpisah, Kepala Dinas Keter-

tiban (Dintib) Kota Jogja Nurwidi Hartana mengatakan, seharusnya peserta pemilu langsung menurunkan APK ketika tahapan pemilu memasuki masa tenang. Namun, pihaknya memberikan waktu sampai H-1 pemungutan suara untuk melakukan penurunan APK. (eri/hrp/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005